

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita sanjungkan kehadiran Allah SWT berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya, Rancangan Awal Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 dapat selesai sesuai waktu. Rencana Kerja ini disusun berdasarkan evaluasi Renja terdahulu untuk penyelarasan program dan kegiatan dengan RPJMD dan Renstra Tahun 2021-2026 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Rencana Kerja ini merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta realisasi tahunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang berisi rencana yang akan dilaksanakan dan target yang akan diraih Tahun 2023. Berbagai keberhasilan yang dicapai merupakan hasil kerja keras dari semua pihak yang terlibat di dalamnya. Hasil kerja tersebut hendaknya akan lebih memotivasi untuk peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat ke depan. Demikian pula sebaliknya atas kekurangan yang dialami hendaknya menjadi bahan introspeksi dan evaluasi terhadap kebijakan yang diambil, sehingga dapat menjadi masukan yang berharga bagi penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat di masa yang akan datang.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rancangan Awal Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 ini masih terdapat kekurangan, untuk itu pada kesempatan ini kami menyampaikan permohonan maaf yang tulus kepada semua pihak atas keterbatasan tersebut.

Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan hidayah serta perlindungan-Nya bagi kita, Amin.

Kuala Tungkal, Januari 2022

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DPM & PTSP
H. YANERY, S.Pt.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19700930 199703 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Menurut Permendagri Nomor 54 tahun 2010, perencanaan pembangunan daerah disusun secara runtut mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan

Tahunan atau Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Semua perencanaan ini merupakan dokumen perencanaan di tingkat kabupaten, sedangkan untuk tingkatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga dilakukan penyusunan perencanaan, yaitu Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD) dengan ruang lingkup waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) dengan ruang lingkup waktu 1 (satu) tahun.

Untuk menyikapi amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tersebut maka Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah melaksanakan penyusunan dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2024.

Penyusunan RPJMD ini dilaksanakan dalam rangka menjabarkan RPJPD. Penyusunan RPJMD ini didasari oleh visi dan misi serta program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya penyusunan RPJMD ini merupakan penyusunan RPJMD tahap ke tiga dalam ruang lingkup RPJPD 2005-2025.

Pada tingkatan SKPD, RPJMD Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2024 ini secara lebih teknis dan operasional dijabarkan kedalam Renstra SKPD, dimana muatan yang terkandung dalam Renstra SKPD adalah visi, misi, kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing selama lima tahun ke depan.

Program dan Kegiatan SKPD tersebut tentunya merupakan pelaksanaan sebagian kebijakan dan program kepala daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026. Di samping itu dalam penyusunan program dan kegiatan, Pemerintah Daerah tetap mengacu kepada RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 dan RPJM Nasional.

Terkait dengan Renstra SKPD tersebut, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Tahun 2021-2026, yang berfungsi dengan sebagai referensi perencanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama lima tahun.

Selanjutnya sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah baru dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga perlu menyusun perencanaan tahunan, yaitu berupa Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Renja). Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini

merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan sekaligus penjabaran Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023.

Oleh Karena itu, sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa setelah RKPD ditetapkan, Kepala SKPD/OPD harus segera menetapkan Renja SKPD masing-masing, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat harus segera menyusun dan menetapkan Rancangan Awal Renja 2023.

1.2. LANDASAN HUKUM

Rencana Kerja disusun berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan ke dua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 23);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005 – 2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam SKPD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

2. Tujuan

- a. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan DPMPTSP Tahun 2023;
- b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan Tahun 2023;
- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN

LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- 2.3 Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**BAB V PENUTUP****BAB II****HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau Program

Program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rancangan Awal Renja (Ranwal Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Tahapan berikutnya diuraikan rangkaian pengukuran kinerja pengelolaan sumber daya keuangan berdasarkan sasaran strategis jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan

Sasaran 1 ditunjang dengan 1 (satu) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang didukung dengan 13 Kegiatan dan 1 (gaji ASN) berikut capaian kinerja sasaran 1 tersaji dalam tabel :

Sasaran	Program	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Nilai AKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penunjang Urusan Pemerintahan	Nilai B	B	100%

Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai A	A	100 %
--	------------------------	---------	---	-------

Pencapaian indikator program pada sasaran 1 bisa dikategorikan “sangat baik”.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Sasaran 2 ditunjang dengan 2 (dua) Program Pelayanan Penanaman Modal di dukung dengan 4 Sub Kegiatan dan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal/ Sub Kegiatan Berikut Capaian Kinerja Sasaran II tersaji dalam tabel :

Sasaran	Program	Target	Realiasasi	Capaian Kinerja
Jumlah Produk Perizinan (Jumlah Jenis kelompok Izin)	Pelayanan Penanaman Modal	2000 Izin	1406 Izin	70,3 %
Jumlah Sistem Informasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterapkan	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	100 %

Pencapaian indikator pada Program Pelayanan Penanaman Modal mencapai 70,3% dengan Kategori “Sangat Baik”

Pencapaian indikator pada Program pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal mencapai 100% dengan Kategori “Sangat Baik”

Sasaran 3 : Meningkatnya Investasi Daerah

Sasaran 3 ditunjang dengan 3 (tiga) Program dan 9 (Sembilan) Sub Kegiatan. Berikut capaian kinerja sasaran 3 tersaji dalam tabel :

Sasaran	Program	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Jumlah Calon Investor	Promosi Penanaman Modal	2 Calon Investor	-	0%
Nilai Realisasi Rencana Investasi	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	162 M	1,1 Trilyun	679,01%
Jumlah Kajian Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %

Pencapaian indikator Program pada sasaran 3 bisa dikategorikan “sangat baik”

Berdasarkan hasil review terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun lalu dan capaian kinerja Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai dengan tahun 2023 dapat disajikan sebagaimana terlihat pada Tabel T-C.29 sebagai berikut :

TABEL : T-C.29

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DPM PTSP DAN PENCAPAIAN RENSTRA DPM PTSP S.D 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANANA TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program (Rensta SKPD Tahun 2021-2026)	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2021	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3			4	5		4		
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai AKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	110 Buku	35 Buku	DPM PTSP	35 Buku	14.022.260.000	10 Laporan	DPM PTSP	100

2.18.01.2.01	perencanaan, Pengeanggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD dan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja	110 Buku	35 Buku	DPM PTSP	35 Buku	100.000.000	10 Laporan	DPM PTSP	100
2.18.01.2.01.6	penyusunan dokumen perencanaan dan perangkat daerah	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja	110 Buku	35 Buku	DPM PTSP	12 Bulan	100.000.000	10 Laporan	DPM PTSP	100
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksannya Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	60 Bulan	12 Bulan	DPM PTSP	12 Bulan	4.700.000.000	32 Dokumen	DPM PTSP	100
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Pengajuan Gaji dan Tunjangan ASN	60 Bulan	12 Bulan	DPM PTSP	12 Bulan	4.500.000.000	24 Dokumen	DPM PTSP	100

2.18.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	60 Bulan	12 Bulan	DPM PTSP	12 Bulan	200.000.000	8 Dokumen	DPM PTSP	100
2.18.01.2.05	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian dengan Baik	426 Stell	82 Stell	DPM PTSP	82 Stell	300.000.000	150 Stell	DPM PTSP	100
2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	426 Stell	82 Stell	DPM PTSP	82 Stell	200.000.000	150 Stell	DPM PTSP	100
2.18.01.2.05.09	pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tujan dan fungsi	meningkatnya SDM	35 orang	35 orang	DPM PTSP	30 orang	100.000.000	35 orang	DPM PTSP	100
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Kelancaran Penyelenggaraan Administrasi Perangkat Daerah	60 Bulan	12 Bulan	DPM PTSP	12 Bulan	1.787.260.000	12 Bulan	DPM PTSP	100

2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	60 Bulan	12 Bulan	DPM PTSP	12 Bulan	230.000.000	15 Jenis	DPM PTSP	100
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	60 Bulan	12 Bulan	DPM PTSP	12 Bulan	250.000.000	50 Jenis	DPM PTSP	100
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Kebutuhan Makan Minum Rapat	60 Bulan	12 Bulan	DPM PTSP	12 Bulan	50.000.000	200 Kotak	DPM PTSP	100
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	60 Bulan	12 Bulan	DPM PTSP	12 Bulan	100.000.000	50.000 Lembar	DPM PTSP	100
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	60 Bulan	12 Bulan	DPM PTSP	12 Bulan	72.000.000	70 Eksampler	DPM PTSP	100

2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Biaya Rapat/ Konsultasi	60 Bulan	12 Bulan	DPM PTSP	12 Bulan	1.085.260.000	12 Bulan	DPM PTSP	100
2.17.01.2.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Terpenuhinya peralatan gedung kantor	60 Bulan	12 Bulan	DPM PTSP	12 Bulan	5.800.000.000	12 Bulan	DPM PTSP	100
2.17.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	60 Bulan	12 Bulan	DPM PTSP	12 Bulan	2.000.000.000	90 Unit	DPM PTSP	100
	Pendadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas atau Lapangan	60 Bulan	12 Bulan	DPM PTSP	12 Bulan	3.000.000.000	28 Unit	DPM PTSP	100
	Pengadaan Mabel	Jumlah Unit Pengadaan Meubelair Kantor	60 Bulan	12 Bulan	DPM PTSP	12 Bulan	800.000.000	20 Meja ½ Biro 40 Kursi Kerja	DPM PTSP	100

2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Fasilitas Fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor	60 Bulan	12 Bulan	DPM PTSP	12 Bulan	665.000.000	12 Bulan	DPM PTSP	100
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	60 Bulan	12 Bulan	DPM PTSP	12 Bulan	15.000.000	12 Bulan	DPM PTSP	100
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Pemakaian Telpon, Air dan Listrik	60 Bulan	12 Bulan	DPM PTSP	12 Bulan	150.000.000	12 Bulan	DPM PTSP	100
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	60 Bulan	12 Bulan	DPM PTSP	12 Bulan	500.000.000	12 Bulan	DPM PTSP	100
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharannya Barang Milik Daerah	60 Bulan	12 Bulan	DPM PTSP	12 Bulan	670.000.000	12 Bulan	DPM PTSP	100

2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dilakukan Pemeliharaan dan Pembayaran Pajaknya	2 Unit	2 Unit	DPM PTSP	2 Unit	200.000.000	6 Unit	DPM PTSP	100
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional yang dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajaknya	14 Unit	14 Unit	DPM PTSP	14 Unit	200.000.000	28 Unit	DPM PTSP	100
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksanya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6 Unit	6 Unit	DPM PTSP	6 Unit	170.000.000	10 Unit	DPM PTSP	100
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60 Bulan	12 Bulan	DPM PTSP	12 Bulan	100.000.000	1 Kali	DPM PTSP	100

2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Kajian Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten	1 Dokumen	1 Dokumen	DPM PTSP	1 Dokumen	180.000.000	1 Dokumen	DPM PTSP	100
2.18.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Produk Hukum Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	DPM PTSP	1 Dokumen	180.000.000	1 Dokumen	DPM PTSP	100
2.18.02.1.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Produk Hukum Daerah	1 Produk Hukum	1 Produk Hukum	DPM PTSP	1 Produk Hukum	95.000.000	1 Produk Hukum	DPM PTSP	100

2.18.02.1.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas. Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Perusahaan Dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat	5 Perusahaan	5 Perusahaan	DPM PTSP	5 Perusahaan	85.000.000	5 Perusahaan	DPM PTSP	100
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya minat investasi melalui penyediaan informasi dan promosi bagi calon investor	2 Calon Investor	1	DPM PTSP	2	175.000.000	2	DPM PTSP	100
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Tercapainya Promosi Potensi dan Peluang Investasi di Daerah	2 Calon Investor	1	DPM PTSP	2	175.000.000	2	DPM PTSP	100
2.18.03.2.01.01	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya data/ Informasi Strategi Promosi Penanaman Modal	2 Pameran Inveatasi	2 Pameran Investasi	DPM PTSP	2 Pameran Investasi	175.000.000	2 Pameran Investasi	DPM PTSP	100

2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya Pelayanan Penanaman Modal	2000 Izin	2000 Izin	DPM PTSP	2000 Izin	2.770.000.000	2000 Izin	DPM PTSP	100
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Tercapainya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu	2000 Izin	2000 Izin	DPM PTSP	2000 Izin	2.770.000.000	2000 Izin	DPM PTSP	100
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara elektronik	Terlaksananya Pelayanan perizinan dan Non Perizinan Berbasis Elektronik	2 Laporan	2 Laporan	DPM PTSP	2 Laporan	2.000.000.000	2 Laporan	DPM PTSP	100

2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Tercapainya Percepatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	2000 Izin	2000 Izin	DPM PTSP	2000 Izin	500.000.000	2000 Izin	DPM PTSP	100
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Tersedianya Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	4 Laporan	4 Laporan	DPM PTSP	4 Laporan	125.000.000	4 Laporan	DPM PTSP	100
2.18.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Penetapan pemberian fasilitas /insentif daerah	3 Produk Hukum	3 Produk Hukum	DPM PTSP	3 Produk Hukum	145.000.000	3 Produk Hukum	DPM PTSP	100
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Tingkat Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal	301 M	301 M	DPM PTSP	301 M	359.240.000	301 M	DPM PTSP	100

2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Pemahaman Pelaku Usaha Terhadap ketentuan Pelaksanaan Penanaman Modal	301 M	301 M	DPM PTSP	301 M	359.240.000	301 M	DPM PTSP	100
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Tersedianya Data dan Informasi Perkembangan Realisasi Penanaman Modal	1 Laporan	1 Laporan	DPM PTSP	1 Laporan	105.500.000	1 Laporan	DPM PTSP	100
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Sosialisasi Aturan dan ketentuan Pelaksanaan Penanaman Modal	2 Kali	2 Kali	DPM PTSP	2 Kali	143.665.000	2 Kali	DPM PTSP	100

2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Penanaman Modal sesuai ketentuan	12 BAP	12 BAP	DPM PTSP	12 BAP	110.075.000	12 BAP	DPM PTSP	100
2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Meningkatnya kualitas Sistem Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	DPM PTSP	1 Sistem Informasi	31.000.000	1 Sistem Informasi	DPM PTSP	100
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Penerapan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	DPM PTSP	1 Sistem Informasi	31.000.000	1 Sistem Informasi	DPM PTSP	100

2.18.06.2.01.01	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi secara elektronik yang dilaksanakan	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	DPM PTSP	1 Sistem Informasi	31.000.000	1 Sistem Informasi	DPM PTSP	100
JUMLAH							17.537.500.000			

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT.

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2024, telah ditetapkan indikator kinerja sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan terhadap masyarakat
2. Meningkatnya realisasi investasi
3. Meningkatnya nilai investasi

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran dimaksud adalah sebagaimana tersaji dalam Tabel T-C.30 sebagai berikut :

TABEL : T-C.30

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Taget Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan terhadap Masyarakat	Skor IKM		Nilai 90	Nilai 92	Nilai 89	Nilai 90	93,6	95	95	96	
		Meningkatnya Kecepatan pengurusan Izin		7 Hari	7 Hari	6 Hari	5 Hari	7 Hari	7 Hari	5 Hari	5 Hari	
		Meningkatnya Jumlah Investor PMA dan PMDN		20 Perusahaan	10 Perusahaan	15 Perusahaan	20 Perusahaan	31 Perusahaan	32 Perusahaan	10 Perusahaan	10 Perusahaan	
2	Meningkatnya Realisasi Investasi	Meningkatnya Informasi dan peta potensi investasi		-	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	

	Meningkatnya Jumlah Pengurusan Izin		2500 Izin	2500 Izin	2000 Izin	2000 Izin	1672 Izin	1510 Izin	2000 Izin	2000 Izin	
	Pemutakhiran (Updating) Data dan Analisis Data/ Informasi Penanamna Modal		-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
	Penangan Pengaduan dalam Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal		-	20 Kasus	20 Kasus	20 Kasus	13 Kasus	6 Kasus	20 Kasus	20 Kasus	

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANJUNGJABUNG BARAT

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, adil, transparan, dan akuntabel harus disikapi dengan serius dan sistematis. Segenap jajaran penyelenggara negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah memiliki komitmen bersama untuk menegakkan good governance dan clean government. Peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak hanya terbatas Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang dikelola saja, tetapi juga banyak melakukan fungsi - fungsi penegakan reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan kinerja instansi pemerintah sesuai dengan tuntutan masyarakat saat ini.

Dengan Pelayanan yang mudah, cepat dan transparan, diharapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga dapat menjadi ikon Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam Penegakan Reformasi Birokrasi yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan menjadi Kantor Percontohan Zona Integritas dari KPK Republik Indonesia. Untuk mendukung hal tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan upaya -upaya agar Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dikelola antara lain :

1. Pengembangan Teknologi Informasi dalam pelayanan perijinan dan non perijinan dengan menggunakan Aplikasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dan juga pengembangan inovasi - inovasi baru dalam penyampaian informasi dengan menggunakan Jaringan Internet, Website, Email dan berbagai peralatan yang terkomputerisasi sehingga akurasi dan tranparansi dapat dipertanggungjawabkan.
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang profesional dan berintegritas yang tinggi. Setiap Sumber Daya Manusia (Pegawai) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat wajib menandatangani Pakta Integritas setiap tahunnya di hadapan Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan memahami Kode Etik yang telah ditetapkan.
3. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (Pegawai) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Pendidikan dan Pelatihan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan guna mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas.
Dalam melaksanakan kegiatan dan program-programnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai Penyelenggara Pelayanan Perizinan terdapat kendala-kendala yang dihadapi yaitu antara lain:
 - Belum optimalnya penerapan dan standar oprasional prosedur tersebut untuk tiap-tiap proses penyelenggaraan perizinan
 - Adanya keterbatasan Sumber Daya Mansuia baik kualitas maupun dalam mendukung pelaksanaan program

- Adanya keterbatasan sarana dan prasarana kerja yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan program termasuk aplikasi sistem informasi dan komunikasi yang dimiliki belum menandai dalam memperlancar pelayanan publik
 - Pemahaman masyarakat tentang pelayanan perizinan di DPMPTSP belum Optimal
 - Implementasi waktu penyelesaian proses perizinan dan sesuai SOP belum Optimal
 - Masih ada peraturan daerah yang belum dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk Teknis
 1. Pemahaman masyarakat tentang layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih rendah
 2. Pelaksanaan SOP Perizinan belum efektif
 3. Penerapan informasi teknologi yang belum optimal
4. Mal Pelayanan Publik (MPP)
- Dasar hukum pembentukan Mal Pelayanan Publik :
- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - b. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
 - c. Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor 128 Tahun 2021 tentang Pentetapan Lokasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Tahun 2021;
 - d. Pernyataan komitmen antara Bupati Tanjung Jabung Barat dengan Menteri PAN dan RB tentang perwujudan Mal Pelayanan Publik, 2 Maret 2021;

- e. SK Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 310/Kep.Bup/PMPTSP/2021 tentang satuan tugas percepatan implementasi Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan Awal RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja BPPPT dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan Awal RKPD, karena pada hakikatnya Renja SKPD tersebut disusun untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD. Pada akhirnya, Renja SKPD juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati.

Hasil telaahan terhadap review rancangan awal RKPD dalam kaitannya dengan analisis kebutuhan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2023 disajikan dalam Tabel T.C-31 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2023
1	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola, Pemerintahan melalui aparatur pemerintah daerah yang berkualitas (Misi. IV)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) layanan perizinan	Nilai	A
2	Meningkatkan pembangunan ekonomi Masyarakat Melalui Investasi Daerah dan daya serap tenaga kerja (Misi III)	Menigkatnya Invetasi Daerah	Peresentase Peningkatan Investasi Daerah	M	301

**TABEL : T-C.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANANA TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

Kode Rek	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2					4	5				4
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	DPM PTSP	Nilai AKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10 Laporan	14.022.260.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	DPM PTSP	Nilai AKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10 Laporan	16.600.000.000	APBD

2.18.01.2.01	perencanaan, Penguangan, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPM PTSP	Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD dan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja	10 Laporan	100.000.000	perencanaan, Penguangan, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPM PTSP	Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD dan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja	10 Laporan	160.000.000	APBD
2.18.01.2.01.6	penyusunan dokumen perencanaan dan perangkat daerah	DPM PTSP	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja	10 Laporan	100.000.000	penyusunan dokumen perencanaan dan perangkat daerah	DPM PTSP	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja	10 Laporan	160.000.000	APBD
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPM PTSP	Terlaksananya Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	32 Dokumen	4.700.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPM PTSP	Terlaksananya Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	32 Dokumen	5.100.000.000	APBD
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPM PTSP	Jumlah Dokumen Pengajuan Gaji dan Tunjangan ASN	24 Dokumen	4.500.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPM PTSP	Jumlah Dokumen Pengajuan Gaji dan Tunjangan ASN	24 Dokumen	4.800.000.000	APBD

2.18.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DPM PTSP	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	8 Dokumen	200.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DPM PTSP	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	8 Dokumen	300.000.000	APBD
2.18.01.2.05	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	DPM PTSP	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian dengan Baik	150 Stell	300.000.000	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	DPM PTSP	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian dengan Baik	150 Stell	350.000.000	APBD
2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	DPM PTSP	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	150 Stell	200.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	DPM PTSP	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	150 Stell	200.000.000	APBD
2.18.01.2.05.09	pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tujan dan fungsi	DPM PTSP	meningkatnya SDM	35 orang	100.000.000	pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tujan dan fungsi	DPM PTSP	meningkatnya SDM	35 orang	150.000.000	APBD
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DPM PTSP	Terwujudnya Kelancaran Penyelenggaraan Administrasi Perangkat Daerah	12 Bulan	1.787.260.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DPM PTSP	Terwujudnya Kelancaran Penyelenggaraan Administrasi	12 Bulan	3.410.000.000	APBD

								Perangkat Daerah			
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPM PTSP	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15 Jenis	230.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPM PTSP	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15 Jenis	220.000.000	APBD
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPM PTSP	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	50 Jenis	250.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPM PTSP	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	50 Jenis	1.500.000.000	APBD
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPM PTSP	Tersedianya Kebutuhan Makan Minum Rapat	200 Kotak	50.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPM PTSP	Tersedianya Kebutuhan Makan Minum Rapat	200 Kotak	60.000.000	APBD
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPM PTSP	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	50.000 Lembar	100.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPM PTSP	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	50.000 Lembar	120.000.000	APBD

2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	DPM PTSP	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	70 Eksampler	72.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	DPM PTSP	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	70 Eksampler	110.000.000	APBD
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPM PTSP	Tersedianya Biaya Rapat/ Konsultasi	12 Bulan	1.085.260.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPM PTSP	Tersedianya Biaya Rapat/ Konsultasi	12 Bulan	1.400.000.000	APBD
2.17.01.2.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	DPM PTSP	Terpenuhiya peralatan gedung kantor	12 Bulan	5.800.000.000	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	DPM PTSP	Terpenuhiya peralatan gedung kantor	12 Bulan	5.800.000.000	APBD
2.17.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	DPM PTSP	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	90 Unit	2.000.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	DPM PTSP	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	90 Unit	2.000.000.000	APBD
	Pendadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPM PTSP	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas atau Lapangan	28 Unit	3.000.000.000	Pendadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPM PTSP	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas atau Lapangan	28 Unit	3.000.000.000	APBD

	Pengadaan Mabel	DPM PTSP	Jumlah Unit Pengadaan Meubelair Kantor	20 Meja ½ Biro 40 Kursi Kerja	800.000.000	Pengadaan Mabel	DPM PTSP	Jumlah Unit Pengadaan Meubelair Kantor	20 Meja ½ Biro 40 Kursi Kerja	800.000.000	APBD
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPM PTSP	Terpenuhi nya Fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor	12 Bulan	665.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPM PTSP	Terpenuhi nya Fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor	12 Bulan	1.040.000.000	APBD
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPM PTSP	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	15.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPM PTSP	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	140.000.000	APBD
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPM PTSP	Tersedianya Jasa Pemakaian Telpon, Air dan Listrik	12 Bulan	150.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPM PTSP	Tersedianya Jasa Pemakaian Telpon, Air dan Listrik	12 Bulan	300.000.000	APBD

2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPM PTSP	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	500.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPM PTSP	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	600.000.000	APBD
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPM PTSP	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	12 Bulan	670.000.000	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPM PTSP	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	12 Bulan	740.000.000	APBD
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPM PTSP	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dilakukan Pemeliharaan dan Pembayaran Pajaknya	6 Unit	200.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPM PTSP	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dilakukan Pemeliharaan dan Pembayaran Pajaknya	6 Unit	200.000.000	APBD

2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPM PTSP	Jumlah kendaraan Dinas Operasional yang dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajaknya	28 Unit	200.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPM PTSP	Jumlah kendaraan Dinas Operasional yang dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajaknya	28 Unit	200.000.000	APBD
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPM PTSP	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 Unit	170.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPM PTSP	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 Unit	190.000.000	APBD
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPM PTSP	Tersedianya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Kali	100.000.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPM PTSP	Tersedianya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Kali	150.000.000	APBD
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPM PTSP	Jumlah Kajian Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten	1 Dokumen	180.000.000	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPM PTSP	Jumlah Kajian Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten	1 Dokumen	85.000.000	APBD

2.18.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	DPM PTSP	Tersedianya Produk Hukum Daerah	1 Dokumen	180.000.000	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPM PTSP	Tersedianya Produk Hukum Daerah	1 Dokumen	85.000.000	APBD
2.18.02.1.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DPM PTSP	Produk Hukum Daerah	1 Produk Hukum	95.000.000	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DPM PTSP	Produk Hukum Daerah	1 Produk Hukum	-	APBD
2.18.02.1.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas. Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DPM PTSP	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Perusahaan Dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat	5 Perusahaan	85.000.000	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas. Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DPM PTSP	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Perusahaan Dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat	5 Perusahaan	85.000.000	APBD

2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	DPM PTSP	Meningkatnya minat investasi melalui penyediaan informasi dan promosi bagi calon investor	2	175.000.000	Program Promosi Penanaman Modal	DPM PTSP	Meningkatnya minat investasi melalui penyediaan informasi dan promosi bagi calon investor	2	185.000.000	APBD
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	DPM PTSP	Tercapainya Promosi Potensi dan Peluang Investasi di Daerah	2	175.000.000	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	DPM PTSP	Tercapainya Promosi Potensi dan Peluang Investasi di Daerah	2	185.000.000	APBD
2.18.03.2.01.01	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	DPM PTSP	Tersedianya data/ Informasi Strategi Promosi Penanaman Modal	2 Pameran Investasi	175.000.000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	DPM PTSP	Tersedianya data/ Informasi Strategi Promosi Penanaman Modal	2 Pameran Investasi	185.000.000	APBD

2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	DPM PTSP	Meningkatnya Pelayanan Penanaman Modal	2000 Izin	2.770.000.000	Program Pelayanan Penanaman Modal	DPM PTSP	Meningkatnya Pelayanan Penanaman Modal	2000 Izin	2.190.000.000	APBD
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	DPM PTSP	Tercapainya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu	2000 Izin	2.770.000.000	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	DPM PTSP	Tercapainya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu	2000 Izin	2.190.000.000	APBD
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara elektronik	DPM PTSP	Terlaksananya Pelayanan perizinan dan Non Perizinan Berbasis Elektronik	2 Laporan	2.000.000.000	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara elektronik	DPM PTSP	Terlaksananya Pelayanan perizinan dan Non Perizinan Berbasis Elektronik	2 Laporan	1.500.000.000	APBD

2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	DPM PTSP	Tercapainya Percepatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	2000 Izin	500.000.000	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	DPM PTSP	Tercapainya Percepatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	2000 Izin	500.000.000	APBD
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	DPM PTSP	Tersedianya Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	4 Laporan	125.000.000	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	DPM PTSP	Tersedianya Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	4 Laporan	40.000.000	APBD
2.18.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	DPM PTSP	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Penetapan pemberian fasilitas /insentif daerah	3 Produk Hukum	145.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	DPM PTSP	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Penetapan pemberian fasilitas /insentif	3 Produk Hukum	150.000.000	APBD

								daerah			
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	DPM PTSP	Tingkat Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal	301 M	359.240.000	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	DPM PTSP	Tingkat Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal	301 M	50.400.000	APBD
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	DPM PTSP	Meningkatnya Pemahaman Pelaku Usaha Terhadap ketentuan Pelaksanaan Penanaman Modal	301 M	359.240.000	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	DPM PTSP	Meningkatnya Pemahaman Pelaku Usaha Terhadap ketentuan Pelaksanaan Penanaman Modal	301 M	50.400.000	APBD

2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPM PTSP	Tersedianya Data dan Informasi Perkembangan Realisasi Penanaman Modal	1 Laporan	105.500.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPM PTSP	Tersedianya Data dan Informasi Perkembangan Realisasi Penanaman Modal	1 Laporan	18.900.000	APBD
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPM PTSP	Sosialisasi Aturan dan ketentuan Pelaksanaan Penanaman Modal	2 Kali	143.665.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPM PTSP	Sosialisasi Aturan dan ketentuan Pelaksanaan Penanaman Modal	2 Kali	24.000.000	APBD

2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPM PTSP	Jumlah pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Penanaman Modal sesuai ketentuan	12 BAP	110.075.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPM PTSP	Jumlah pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Penanaman Modal sesuai ketentuan	12 BAP	7.500.000	APBD
2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	DPM PTSP	Meningkatnya kualitas Sistem Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	1 Sistem Informasi	31.000.000	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	DPM PTSP	Meningkatnya kualitas Sistem Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	1 Sistem Informasi	40.000.000	APBD

<p>2.18.06.2.01</p>	<p>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</p>	<p>DPM PTSP</p>	<p>Penerapan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik</p>	<p>1 Sistem Informasi</p>	<p>31.000.000</p>	<p>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</p>	<p>DPM PTSP</p>	<p>Penerapan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik</p>	<p>1 Sistem Informasi</p>	<p>40.000.000</p>	<p>APBD</p>
<p>2.18.06.2.01.01</p>	<p>Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik</p>	<p>DPM PTSP</p>	<p>Jumlah Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi secara elektronik yang dilaksanakan</p>	<p>1 Sistem Informasi</p>	<p>31.000.000</p>	<p>Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik</p>	<p>DPM PTSP</p>	<p>Jumlah Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi secara elektronik yang dilaksanakan</p>	<p>1 Sistem Informasi</p>	<p>40.000.000</p>	<p>APBD</p>

JUMLAH	17.537.500.000	JUMLAH	19.150.400.000	
---------------	----------------	---------------	----------------	--

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT.

Dalam menyusun Rancangan Awal Renja (Ranwal Renja 2023), salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung usulan program dan kegiatan yang berasal dari bawah atau aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting dilaksanakan karena pada hakekatnya masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari pogram dan kegiatan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD.

Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat berupaya semaksimal mungkin untuk menampung aspirasi masyarakat dengan berbagai cara dan dalam berbagai kesempatan. Dalam kesempatan Musrenbang tahun 2023, Aspirasi masyarakat akan menjadi perhatian serius Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023. Suatu langkah penting yang harus diambil adalah kembali menata dan menyusun berbagai peraturan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan sehingga program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dijalankan dengan tertib, terarah, efektif dan efisien.

Berdasarkan hal diatas, usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang pada tingkat kecamatan, Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Sebagaimana pada tabel T-C.32 Sebagai Berikut :

**TABEL : T-C.32
USULAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANANA TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

Kode Rek	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	DPM PTSP	Nilai AKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14.237.000.000	APBD
			Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
2.18.01.2.01	perencanaan, Pengaanggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPM PTSP	Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD dan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja	100.000.000	APBD
2.18.01.2.01.6	penyusunan dokumen perencanaan dan perangkat daerah	DPM PTSP	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja	100.000.000	APBD

2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPM PTSP	Terlaksannya Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.700.000.000	APBD
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPM PTSP	Jumlah Dokumen Pengajuan Gaji dan Tunjangan ASN	4.500.000.000	APBD
2.18.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DPM PTSP	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	200.000.000	APBD
2.18.01.2.05	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	DPM PTSP	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian dengan Baik	500.000.000	APBD
2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	DPM PTSP	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	200.000.000	APBD
2.18.01.2.05.09	pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tuga dan fungsi	DPM PTSP	meningkatnya SDM	300.000.000	APBD
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DPM PTSP	Terwujudnya Kelancaran Penyelenggaraan Administrasi Perangkat Daerah	1.872.000.000	APBD
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	DPM PTSP	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	200.000.000	APBD
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPM PTSP	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	250.000.000	APBD

2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPM PTSP	Tersedianya Kebutuhan Makan Minum Rapat	50.000.000	APBD
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPM PTSP	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	100.000.000	APBD
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	DPM PTSP	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	72.000.000	APBD
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPM PTSP	Tersedianya Biaya Rapat/ Konsultasi	1.200.000.000	APBD
2.17.01.2.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	DPM PTSP	Terpenuhiya peralatan gedung kantor	5.800.000.000	APBD
2.17.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	DPM PTSP	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	2.000.000.000	APBD
	Pendadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPM PTSP	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas atau Lapangan	3.000.000.000	APBD
	Pengadaan Mabel	DPM PTSP	Jumlah Unit Pengadaan Meubelair Kantor	800.000.000	APBD

2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPM PTSP	Terpenuhinya Fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor	665.000.000	APBD
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPM PTSP	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	15.000.000	APBD
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPM PTSP	Tersedianya Jasa Pemakaian Telpon, Air dan Listrik	150.000.000	APBD
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPM PTSP	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	500.000.000	APBD
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPM PTSP	Terpeliharannya Barang Milik Daerah	600.000.000	APBD
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPM PTSP	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dilakukan Pemeliharaan dan Pembayaran Pajaknya	200.000.000	APBD
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPM PTSP	Jumlah kendaraan Dinas Operasional yang dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajaknya	200.000.000	APBD

2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPM PTSP	Terlaksanya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000	APBD
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPM PTSP	Tersedianya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000	APBD
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPM PTSP	Jumlah Kajian Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten	180.000.000	APBD
2.18.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPM PTSP	Tersedianya Produk Hukum Daerah	180.000.000	APBD
2.18.02.1.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DPM PTSP	Produk Hukum Daerah	95.000.000	APBD
2.18.02.1.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas, Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DPM PTSP	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Perusahaan Dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat	85.000.000	APBD

2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	DPM PTSP	Meningkatnya minat investasi melalui penyediaan informasi dan promosi bagi calon investor	175.000.000	APBD
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	DPM PTSP	Tercapainya Promosi Potensi dan Peluang Investasi di Daerah	175.000.000	APBD
2.18.03.2.01.01	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	DPM PTSP	Tersedianya data/ Informasi Strategi Promosi Penanaman Modal	175.000.000	APBD
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	DPM PTSP	Meningkatnya Pelayanan Penanaman Modal	577.000.000	APBD
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	DPM PTSP	Tercapainya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu	2.770.000.000	APBD
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara elektronik	DPM PTSP	Terlaksananya Pelayanan perizinan dan Non Perizinan Berbasis Elektronik	2.000.000.000	APBD

2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitemen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	DPM PTSP	Tercapainya Percepatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	500.000.000	APBD
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	DPM PTSP	Tersedianya Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	125.000.000	APBD
2.18.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	DPM PTSP	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Penetapan pemberian fasilitas / insentif daerah	145.000.000	APBD
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	DPM PTSP	Tingkat Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal	359.240.000	APBD
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	DPM PTSP	Meningkatnya Pemahaman Pelaku Usaha Terhadap ketentuan Pelaksanaan Penanaman Modal	359.240.000	APBD
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPM PTSP	Tersedianya Data dan Informasi Perkembangan Realisasi Penanaman Modal	105.500.000	APBD

2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPM PTSP	Sosialisasi Aturan dan ketentuan Pelaksanaan Penanaman Modal	143.665.000	APBD
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPM PTSP	Jumlah pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Penanaman Modal sesuai ketentuan	110.075.000	APBD
2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	DPM PTSP	Meningkatnya kualitas Sistem Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	31.000.000	APBD
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	DPM PTSP	Penerapan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	31.000.000	APBD
2.18.06.2.01.01	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DPM PTSP	Jumlah Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi secara elektronik yang dilaksanakan	31.000.000	APBD

JUMLAH			17.537.500.000	
--------	--	--	----------------	--

BAB III**TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT****3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai salah satu dari fungsi strategis penyelenggaraan pemerintahan, fungsi strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjng Jabung Barat Sebagai salah satu instansi di lingkungan pemerintah daerah perlu ditunjang dengan kesiapan perangkat kerja dan perencanaan strategis yang tepat. Perencanaan strategis yang disusun digunakan untuk memetakan fungsi strategis dalam bentuk pernyataan visi, misi, sasaran, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan sangat diperlukan guna tercapainya tujuan organisasi. Arah kebijakan pelayanan perijinan terpadu satu pintu sebagai model dari pelayanan publik yang langsung menyentuh masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang lebih baik dengan prosedur yang mudah, waktu yang cepat dan biaya yang transparan. Arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjng Jabung Barat:

1. Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro, kecil dan menengah.
2. Mengurangi jumlah “Perantara” dalam pengurusan perijinan sehingga dapat memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang lebih baik dengan prosedur yang mudah, waktu penyelesaian yang cepat dan biaya yang transparan.

3. Peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non perijinan dengan mengembangkan pelayanan prima yang berbasis teknologi informasi serta mewujudkan keterpaduan dan konsistensi pelayanan kepada masyarakat.
4. Pelayanan yang ramah, mudah cepat dan transparan serta tanggap dalam merespon pengaduan maupun permasalahan yang timbul atas pelayanan perijinan dan non perijinan yang diterima masyarakat.
5. Menjalinkan koordinasi dan komunikasi antar instansi yang terkait dalam pelaksanaan pelayanan perijinan dan non perijinan dan selaras terhadap kebijakan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Koordinasi dan komunikasi antar instansi ini melibatkan Dinas / Instansi Teknis dan pihak-pihak terkait lainnya.
6. Meningkatkan mutu pelayanan dengan pengembangan inovasi pelayanan perijinan dan non perijinan serta peningkatan kompetensi, integritas dan profesionalisme Sumber Daya Aparatur

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang ingin dicapai atau dihasilkan pada akhir periode Renstra. Berdasarkan tujuan tersebut, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan sasaran yang harus dicapai dalam kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun ke depan, dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya (SDM, dana, dan sarana/prasarana) yang dimiliki, faktor lingkungan yang mempengaruhi dan faktor-faktor kunci keberhasilan.

Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Kaitan antara tujuan, sasaran dan program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah seperti diuraikan di bawah ini.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan Pembangunan di bidang Perijinan menetapkan **VISI “MEWUJUDKAN PELAYANAN PERIJINAN DAN BERINVESTASI YANG MUDAH, TRANSPARAN DAN PASTI”** Adapun makna yang terkandung dalam Visi tersebut adalah :

1. Pelayanan Perijinan dan berinvestasi yang mudah bermakna bahwa proses pelayanan perijinan dan berinvestasi tidak berbelit-belit, mudah di mengerti dan tidak melibatkan personil yang melebihi beban volume kerja yang berdampak pada biaya.

2. Pelayanan Perijinan dan berinvestasi yang murah bermakna bahwa meminimalisir biaya yang dikeluarkan dan bila memungkinkan bebas biaya.
3. Pelayanan Perijinan dan berinvestasi yang pasti bermakna bahwa ijin yang telah diperoleh dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat diatas, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tujuan dan setiap tujuan memiliki sasaran tertentu maka ditetapkanlah Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan tata kelola administrasi kantor untuk mencapai efisiensi efektifitas dan kenyamanan kerja.
2. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi Perizinan penanaman modal dan Investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Meningkatkan pengembangan dan kerjasama penanaman modal untuk dapat mentransformasikan segala potensi daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjadi kekuatan ekonomi yang nyata secara efektif dan efisien.
4. Meningkatkan promosi peluang investasi serta produk unggulan Kabupaten Tanjung Jabung Barat di dalam dan luar negeri.
5. Meningkatkan pelayanan Perizinan penanaman modal dan Investasi sesuai dengan kewenangan Kabupaten.
6. Meningkatkan pengendalian pelaksanaan Perizinan penanaman modal dan Investasi pada perusahaan fasilitas dan non fasilitas sesuai dengan kewenangan Kabupaten.

Dari Penjabaran di atas, maka didapat tujuan dan sasaran dari Misi Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Sebagai Berikut :

1. Melakukan inovasi dalam pengembangan teknologi informasi yang komprehensif dan kontinyu sesuai dengan perkembangan yang ada dalam pengelolaan perijinan dan non perijinan serta perizinan penanaman modal dan investasi;
2. Melakukan peningkatan kapasitas sarana dan prasarana yang mendukung proses perijinan dan non perijinan serta Perizinan penanaman modal dan investasi yang berbasis IT;
3. Melakukan koordinasi dengan lembaga lain dalam transparansi biaya perijinan dan non perijinan serta Perizinan penanaman modal dan Investasi dengan teknologi yang terintegrasi;
4. Melakukan pelayanan yang terbuka dan mudah dengan berbasis teknologi informasi melalui penyediaan sarana dan prasarana teknologi informasi;
5. Melakukan system pengelolaan perijinan yang handal dengan mengembangkan pola pelayanan perijinan yang efektif dan efisiensi yaitu tepat waktu, tepat biaya, dan tepat sasaran sehingga tercipta system pelayanan perijinan yang mudah, murah, cepat dan pasti.
6. Menciptakan suasana perkantoran yang tenang, aman dan nyaman khususnya bagi pemohon/publik;
7. Melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana aparatur;
8. Perekrutan pegawai dengan profesional dan terbuka untuk umum melalui metode uji kepatutan dan uji kelayakan (Fit and Proper Test);
9. Mendorong dan memfasilitasi peningkatan Sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan formal dan informal;

10. Melakukan sinergitas pengelolaan pelayanan perijinan yang tangguh dengan stakeholders sesuai prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.
11. Melakukan menandatangani Pakta Integritas bagi seluruh Sumber Daya Aparatur Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam melaksanakan kegiatannya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat bersumber dari dana APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Oleh karena itu dalam pendanaan lebih difokuskan pada program dan kegiatan yang memiliki manfaat bagi peningkatan perijinan dan non perijinan serta Perizinan penanaman modal dan Investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Hal ini dapat digambarkan dalam bentuk Program dan Kegiatan yang akan digunakan pada penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaab dan Peraturan Perundang-Undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pengadaan Mabel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Kegiatan : Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
- Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/ Insentif dan kemudahan Penanaman Modal

3. Program Promosi Penanaman Modal

Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota

Sub Kegiatan :

- Pelaksanaan Kegiatan penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota

4. Program Pelayanan Penanaman Modal

Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik
- Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Perizinan Penanaman Modal
- Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan terpadu Perizinan dan Non Perizinan
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Fasilitas Insentif Daerah

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
- Koordinasi dan Sinkronisasi pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Kegiatan : Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan :

- Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan secara lengkap dapat dibaca pada Tabel T.C-33 sebagai berikut :

TABEL : T-C.33

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANANA TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagi Indikatif	Sumbe r Dana	Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagi Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5			4	5		
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai AKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPM PTSP	10 Laporan	14.022.260.000	APBD	DPM PTSP	10 Laporan	16.600.000.000	APBD
		Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu								

2.18.01.2.01	perencanaan, Pengaangaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD dan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja	DPM PTSP	10 Laporan	100.000.000	APBD	DPM PTSP	10 Laporan	160.000.000	APBD
2.18.01.2.01.6	penyusunan dokumen perencanaan dan perangkat daerah	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja	DPM PTSP	10 Laporan	100.000.000	APBD	DPM PTSP	10 Laporan	160.000.000	APBD
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksannya Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPM PTSP	32 Dokumen	4.700.000.000	APBD	DPM PTSP	32 Dokumen	5.100.000.000	APBD
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Pengajuan Gaji dan Tunjangan ASN	DPM PTSP	24 Dokumen	4.500.000.000	APBD	DPM PTSP	24 Dokumen	4.800.000.000	APBD
2.18.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	DPM PTSP	8 Dokumen	200.000.000	APBD	DPM PTSP	8 Dokumen	300.000.000	APBD

2.18.01.2.05	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian dengan Baik	DPM PTSP	150 Stell	300.000.000	APBD	DPM PTSP	150 Stell	350.000.000	APBD
2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	DPM PTSP	150 Stell	200.000.000	APBD	DPM PTSP	150 Stell	200.000.000	APBD
2.18.01.2.05.09	pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tujan dan fungsi	meningkatnya SDM	DPM PTSP	35 orang	100.000.000	APBD	DPM PTSP	35 orang	150.000.000	APBD
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Kelancaran Penyelenggaraan Administrasi Perangkat Daerah	DPM PTSP	12 Bulan	1.787.260.000	APBD	DPM PTSP	12 Bulan	3.410.000.000	APBD
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPM PTSP	15 Jenis	230.000.000	APBD	DPM PTSP	15 Jenis	220.000.000	APBD

2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	DPM PTSP	50 Jenis	250.000.000	APBD	DPM PTSP	50 Jenis	1.500.000.000	APBD
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Kebutuhan Makan Minum Rapat	DPM PTSP	200 Kotak	50.000.000	APBD	DPM PTSP	200 Kotak	60.000.000	APBD
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	DPM PTSP	50.000 Lembar	100.000.000	APBD	DPM PTSP	50.000 Lembar	120.000.000	APBD
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	DPM PTSP	70 Eksample r	72.000.000	APBD	DPM PTSP	70 Eksample r	110.000.000	APBD
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Biaya Rapat/ Konsultasi	DPM PTSP	12 Bulan	1.085.260.000	APBD	DPM PTSP	12 Bulan	1.400.000.000	APBD

2.17.01.2.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Terpenuhinya peralatan gedung kantor	DPM PTSP	12 Bulan	5.800.000.000	APBD	DPM PTSP	12 Bulan	5.800.000.000	APBD
2.17.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	DPM PTSP	90 Unit	2.000.000.000	APBD	DPM PTSP	90 Unit	2.000.000.000	APBD
	Pendadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas atau Lapangan	DPM PTSP	28 Unit	3.000.000.000	APBD	DPM PTSP	28 Unit	3.000.000.000	APBD
	Pengadaan Mabel	Jumlah Unit Pengadaan Meubelair Kantor	DPM PTSP	20 Meja ½ Biro 40 Kursi Kerja	800.000.000	APBD	DPM PTSP	20 Meja ½ Biro 40 Kursi Kerja	800.000.000	APBD

2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor	DPM PTSP	12 Bulan	665.000.000	APBD	DPM PTSP	12 Bulan	1.040.000.000	APBD
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	DPM PTSP	12 Bulan	15.000.000	APBD	DPM PTSP	12 Bulan	140.000.000	APBD
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Pemakaian Telpon, Air dan Listrik	DPM PTSP	12 Bulan	150.000.000	APBD	DPM PTSP	12 Bulan	300.000.000	APBD

2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	DPM PTSP	12 Bulan	500.000.000	APBD	DPM PTSP	12 Bulan	600.000.000	APBD
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharannya Barang Milik Daerah	DPM PTSP	12 Bulan	670.000.000	APBD	DPM PTSP	12 Bulan	740.000.000	APBD
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dilakukan Pemeliharaan dan Pembayaran Pajaknya	DPM PTSP	6 Unit	200.000.000	APBD	DPM PTSP	6 Unit	200.000.000	APBD
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan Dinas Operasional yang dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajaknya	DPM PTSP	28 Unit	200.000.000	APBD	DPM PTSP	28 Unit	200.000.000	APBD

	atau Lapangan									
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksanya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPM PTSP	10 Unit	170.000.000	APBD	DPM PTSP	10 Unit	190.000.000	APBD
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPM PTSP	1 Kali	100.000.000	APBD	DPM PTSP	1 Kali	150.000.000	APBD
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Kajian Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten	DPM PTSP	1 Dokumen	180.000.000	APBD	DPM PTSP	1 Dokumen	85.000.000	APBD
2.18.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi	Tersedianya Produk Hukum Daerah	DPM PTSP	1 Dokumen	180.000.000	APBD	DPM PTSP	1 Dokumen	85.000.000	APBD

	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									
2.18.02.1.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Produk Hukum Daerah	DPM PTSP	1 Produk Hukum	95.000.000	APBD	DPM PTSP	1 Produk Hukum	-	APBD
2.18.02.1.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas, Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Perusahaan Dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat	DPM PTSP	5 Perusahaan	85.000.000	APBD	DPM PTSP	5 Perusahaan	85.000.000	APBD

2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya minat investasi melalui penyediaan informasi dan promosi bagi calon investor	DPM PTSP	2	175.000.000	APBD	DPM PTSP	2	185.000.000	APBD
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Tercapainya Promosi Potensi dan Peluang Investasi di Daerah	DPM PTSP	2	175.000.000	APBD	DPM PTSP	2	185.000.000	APBD
2.18.03.2.01.01	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya data/ Informasi Strategi Promosi Penanaman Modal	DPM PTSP	2 Pameran Investasi	175.000.000	APBD	DPM PTSP	2 Pameran Investasi	185.000.000	APBD

2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya Pelayanan Penanaman Modal	DPM PTSP	2000 Izin	2.770.000.000	APBD	DPM PTSP	2000 Izin	2.190.000.000	APBD
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Tercapainya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu	DPM PTSP	2000 Izin	2.770.000.000	APBD	DPM PTSP	2000 Izin	2.190.000.000	APBD

2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara elektronik	Terlaksananya Pelayanan perizinan dan Non Perizinan Berbasis Elektronik	DPM PTSP	2 Laporan	2.000.000.000	APBD	DPM PTSP	2 Laporan	1.500.000.000	APBD
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitemen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Tercapainya Percepatan Penyelenggraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	DPM PTSP	2000 Izin	500.000.000	APBD	DPM PTSP	2000 Izin	500.000.000	APBD
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Tersedianya Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	DPM PTSP	4 Laporan	125.000.000	APBD	DPM PTSP	4 Laporan	40.000.000	APBD

2.18.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Penetapan pemberian fasilitas /insentif daerah	DPM PTSP	3 Produk Hukum	145.000.000	APBD	DPM PTSP	3 Produk Hukum	150.000.000	APBD
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Tingkat Pengendalian pelaksanaan penanaman Modal	DPM PTSP	301 M	359.240.000	APBD	DPM PTSP	301 M	50.400.000	APBD

<p>2.18.05.2.01</p>	<p>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</p>	<p>Meningkatnya Pemahaman Pelaku Usaha Terhadap ketentuan Pelaksanaan Penanaman Modal</p>	<p>DPM PTSP</p>	<p>301 M</p>	<p>359.240.000</p>	<p>APBD</p>	<p>DPM PTSP</p>	<p>301 M</p>	<p>50.400.000</p>	<p>APBD</p>
<p>2.18.05.2.01.01</p>	<p>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal</p>	<p>Tersedianya Data dan Informasi Perkembangan Realisasi Penanaman Modal</p>	<p>DPM PTSP</p>	<p>1 Laporan</p>	<p>105.500.000</p>	<p>APBD</p>	<p>DPM PTSP</p>	<p>1 Laporan</p>	<p>18.900.000</p>	<p>APBD</p>

2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Sosialisasi Aturan dan ketentuan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPM PTSP	2 Kali	143.665.000	APBD	DPM PTSP	2 Kali	24.000.000	APBD
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Penanaman Modal sesuai ketentuan	DPM PTSP	12 BAP	110.075.000	APBD	DPM PTSP	12 BAP	7.500.000	APBD

<p>2.18.06</p>	<p>Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</p>	<p>Meningkatnya kualitas Sistem Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik</p>	<p>DPM PTSP</p>	<p>1 Sistem Informasi</p>	<p>31.000.000</p>	<p>APBD</p>	<p>DPM PTSP</p>	<p>1 Sistem Informasi</p>	<p>40.000.000</p>	<p>APBD</p>
<p>2.18.06.2.01</p>	<p>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</p>	<p>Penerapan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik</p>	<p>DPM PTSP</p>	<p>1 Sistem Informasi</p>	<p>31.000.000</p>	<p>APBD</p>	<p>DPM PTSP</p>	<p>1 Sistem Informasi</p>	<p>40.000.000</p>	<p>APBD</p>

2.18.06.2.01.01	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi secara elektronik yang dilaksanakan	DPM PTSP	1 Sistem Informasi	31.000.000	APBD	DPM PTSP	1 Sistem Informasi	40.000.000	APBD
JUMLAH					17.537.500.000				19.150.400.000	

BAB IV**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diuraikan bahwa pada Bab IV fokus perhatiannya adalah terkait dengan rencana kerja dan pendanaan dokumen rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022.

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja (Renja) disusun untuk satu tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang ditrasformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA- PPAS).

Rumusan program dan kegiatan pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembanguanna daerah. Dalam Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023, baik program utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung visi dan misi daerah, maupun program dan kegiatan pendukung. Untuk menilai

pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program.

Seluruh program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 yang tertuang dalam Renja didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB V PENUTUP

Terkait dengan penyiapan dan penyediaan dokumen perencanaan pembangunan Rencana Kerja di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 yang memuat visi, misi, kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 tahun kedepan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kemudian terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMD) Kabupaten Tanjung Tahun 2021-2026.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari kedua dokumen perencanaan di atas maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini memuat hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Renja tahun lalu, permasalahan dan rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengguna anggaran beserta jajarannya pada tahun yang akan datang.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini sangat tergantung kepada peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, melalui pemberian

dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing.

Keberhasilan pelaksanaan Renja DPM & PTSP juga tergantung kepada keseriusan segenap unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi segenap unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penataan pengelolaan program dan kegiatan tersebut selama satu tahun yang akan datang, baik dari segi tata kelola sumberdaya manusia, tata kelola anggaran yang telah dialokasikan maupun tata kelola peralatan/perlengkapan. Diharapkan pada awal tahun anggaran berjalan atau awal tahun 2023, seluruh kebutuhan pelaksanaan program/kegiatan tersebut sudah dapat diselesaikan.

Kuala Tungkal, Januari 2022

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DPM & PTSP
H. YANERY, S.Pt.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19700930 199703 1 003

